

Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia

Hairiyah

Universitas Alma Ata, Yogyakarta

E-mail: hairiyah@almaata.ac.id

Abstract: The discourse of Islam and nationalism became an interesting topic of conversation at the beginning of the 20th century when the Islamic world intersected with the idea of a Western-style nation-state in the Islamic world. The nation-state concept is considered a-historical for Muslim societies. Almost all Muslim countries in the third world, including Indonesia, experience nation-state problems in finding their national identity and character (nation character buildings). Especially in Indonesia, this kind of nation-state problem has sometimes not been completely resolved which in turn will always give rise to the "Islam vs. State" with a dichotomous designation; religious state (*diniyyah*) and a secular state (*la diniyyah*). Opposition and dichotomy like this will become an obstacle in the administration of the state in the context of a nation-state. This paper uses an analytical-historical approach that is focused on the role of Sarekat Islam (SI) in the struggle for Islamic politics during the period of the national movement. This organization breathed the spirit of nationalism based on Islam for the first time in Indonesia. The current existence of political Islam should follow in the footsteps of Sarekat Islam, in upholding nationalism as a nation, Muslims must be able to become pioneers in maintaining harmony in a very pluralistic society.

Keywords: *Islam, Nationalism, Politic*

Abstrak: Wacana Islam dan Nasionalisme menjadi perbincangan menarik pada awal abad ke 20 ketika dunia Islam bersinggungan dengan ide *nation-state* ala Barat ke dunia Islam. Konsep *nation-state* dianggap a-historis bagi masyarakat Muslim. Hampir semua negara Muslim di dunia ketiga termasuk Indonesia, mengalami problem *nation-state* dalam mencari identitas dan karakter kebangsaannya (*nation character buildings*). Khususnya di Indonesia, problem *nation-state* semacam ini terkadang belum terselesaikan tuntas yang pada gilirannya akan selalu melahirkan penghadapan "Islam vs. Negara" dengan sebutan yang dikotomis; negara agama (*diniyyah*) dan negara sekuler (*la diniyyah*). Pertentangan dan dikotomi seperti ini akan menjadi ganjalan dalam penyelenggaraan negara dalam konteks *nation-state*. Tulisan ini menggunakan pendekatan analytical-historis yang difokuskan pada peran

Sarekat Islam (SI) dalam pengumpulan politik Islam pada masa pergerakan nasional. Organisasi inilah yang menghembuskan semangat nasionalisme yang berbasis Islam pertama kali di Indonesia. Eksistensi politik Islam saat ini seharusnya mengikuti jejak Sarekat Islam, dalam menegakkan nasionalisme berkebangsaan, umat Islam harus bisa menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat yang sangat majemuk.

Kata Kunci: Islam, Nasionalisme, Politik

Pendahuluan

Perdebatan Islam dan Nasionalisme selama dekade awal abad ke-20 merupakan wacana politik yang paling seru di dunia Islam.¹ Penerimaan Islam terhadap konsep nasionalisme adalah upaya bagaimana mempertahankan konsep politik Islam dengan gagasan kebangsaan dan kewarganagaraan, ini terbukti pada akhir abad ke-20 terjadi pertentangan antara nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam.²

Islam dan Nasionalisme selain sebagai wacana sekaligus merupakan gerakan politik di Negara-negara yang berpenduduk muslim, terutama semenjak Jamaluddin al-Afghani mengumandangkan gagasan *Pan Islamisme* di tengah maraknya gerakan politik di negara-negara Islam untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pan Islamisme adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk mencari *spirit of Islam*, memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa Islam kepada kemajuan.³

Semangat “perlawanan berbasis kesadaran Islam” yang digaungkan Jamaluddin al-Afghani, segera mendapat respon positif di berbagai negeri muslim. Salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, pola pemikiran yang dihembuskan al-Afghani dan kedua muridnya (Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh) segera menjadi *won* bagi semangat persatuan dan pergerakan Islam. Basis kesadaran atas

¹ Lihat: Robert W. Hefner, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS 2001), hlm. 76

² Untuk menganalisis secara lebih lengkap tentang ketegangan antara nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam. Baca: Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*..... cari internet

³ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme; Reposisi wacana Universal Dalam Konteks Nasional* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 29.

dasar Islam ini memberikan inspirasi dan semangat bagi gerakan-gerakan Islam di Indonesia yang berskala lokal maupun nasional.

Amat menarik mengkaji hubungan Islam dan negara dalam konfigurasi dan praktek politik Islam di Indonesia. Hubungan keduanya meskipun dalam beberapa kasus terlihat sejalan, namun pada kenyataannya sering terjebak dalam ruang politik yang konfrontatif, juga diskursitas yang dikedepankan keduanya menjadi akar polemik yang tak kunjung usai dalam pentas politik Indonesia. Sebuah contoh kasus pergumulan Islam dan konsep kenegaraan pada masa pergerakan nasional Indonesia adalah pada peran gerakan politik Sarekat Islam (SI). SI adalah sebuah organisasi Islam yang menghembuskan semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia. SI didirikan Pada tahun 1911, yang merupakan organisasi sosial-politik umat Islam modern yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Islam. Mengenai hal ini Deliar Noer menyatakan, nasionalisme Indonesia sebenarnya dimulai dengan nasionalisme Islam. Dan sesuatu gerakan yang penting di Indonesia mulanya adalah gerakan orang-orang Islam.⁴

Selain SI, kemudian berdiri beberapa organisasi/gerakan modern yang berbasis pada agama (Islam) di antaranya adalah Muhammadiyah (1912) dan NU (1926). Namun ada juga organisasi/gerakan yang beraliran sekuler dan nasionalis, yaitu PKI (1924) dan PNI (1927). Dalam masa pergerakan nasional dimana pencarian identitas bangsa yang harus keluar dari belenggu kolonialisme Belanda, dalam pergumulannya tidak bisa terlepas antara kelompok Islam dengan kelompok yang mengatasnamakan nasionalis.

Berlatar belakang deskripsi di atas, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan pergumulan antara Islam dan nasionalisme masa pergerakan nasional Indonesia, selanjutnya menelusuri sejarah SI dan pergumulan politik Islam pada masa pergerakan nasional. Dipilihnya SI sebagai sebuah analisis dalam tulisan ini, karena organisasi inilah yang menghembuskan semangat nasionalisme yang berbasiskan Islam pertama kali di Indonesia.

⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 253-257.

Nasionalisme dan Islam: Sebuah Pergumulan

Ide nasionalisme⁵ merupakan spirit dari pembentukan *nation-state* yang muncul dan dipraktekkan di Barat pada abad XVII menggantikan pemerintahan tradisional. Ide nasionalisme sendiri secara umum tidak bisa terlepas dari dua tonggak kesejarahan; *pertama*, Revolusi Perancis dan perang Napoleon yang meluas dari Perancis sampai ke negara-negara Eropa, terutama Jerman, Italia, Spanyol dan Rusia. *Kedua*, gerakan-gerakan antikolonial yang berkobar pada awal abad duapuluh dan telah menyebar ke Asia, Afrika dan benua lainnya, termasuk ke Dunia Islam pada umumnya.⁶

Nation-state atau negara-bangsa, terdiri dari dua kata yaitu *nation* dan *state*. *State* (negara) merupakan satu *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatahui hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menciptakan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. *Nation* (bangsa) merupakan sinonim dari sebuah *state* (negara) atau sebuah kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum.⁷ Term *nation-state* terkait erat dengan *nationality* atau *nationalism*. Nasionalisme terdiri dari dua kata; nasional dan isme. Kata nasional mempunyai arti; 1) kebangsaan, 2) bersifat bangsa. Sedangkan isme adalah paham atau ajaran. Jadi, nasionalisme adalah (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.⁸

Term nasionalisme diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar umat manusia sehingga mereka membentuk suatu identitas kebangsaan, karena nasionalisme adalah rasa kebersamaan golongan (*a sense of belonging together*) sebagai suatu "bangsa".⁹ Selain pengertian di atas nasionalisme

⁵ Nasionalisme merupakan sebuah kelompok masyarakat yang bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas yang salah satu tujuannya adalah menginginkan adanya perbaikan dan kesejahteraan nasib dan bangsanya.

⁶ Dankwart A. Rustow, entri "*Nation*" dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. 11 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), hlm. 8.

⁷ Dankwart A. Rustow, hlm. 7-13.

⁸ Lihat: Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 509-60.

⁹ Lothrop Stoddard, *The New World of Islam* (London: Chapman and Hall Ltd, 1922), hlm. 137.

juga diartikan sebagai gagasan politik dan sosial terutama bertujuan menyatukan setiap kelompok atau suku bangsa yang menjadikan mereka patuh pada satu orde politik. Nasionalisme itu didasarkan atas kesamaan bahasa, sejarah, adat istiadat dan kualitas tertentu.⁷

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.¹⁰

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkutan paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.¹¹

Islam dalam kesejarahannya tidak pernah ada nasionalisme, Islam menggalakkan keharmonisan masyarakat Islam atau *ummat*. Penduduk Islam di seluruh dunia tidak pandang bangsa, warna dan keturunan, sholat di kiblat yang sama, berpuasa pada bulan Ramadhan yang sama serta menunaikan haji di Ka'bah yang sama. Malah sewaktu menunaikan haji atau umrah, semua orang wajib memakai kain ihram putih yang sama. Perkataan *ummat* selalu disalahterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai negara (*nation*) (berlainan dengan gerakan "Nation of Islam" dan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ditolak oleh kebanyakan orang Islam.

Adapun pengumulan Islam vs. *nation-state* dalam ruang politik kenegaraan modern merupakan salah satu dampak terbesar penetrasi Barat ke Dunia Islam. Konsep *nation-state* dianggap a-historis bagi

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>.

¹¹ *Ibid.*

masyarakat Muslim.¹² *Nation-state* merupakan unit utama yang di dalamnya meliputi berbagai komponen masyarakat termasuk masyarakat agama yang heterogen, sebaliknya dalam doktrin Islam klasik, masyarakat agama dengan identitas dan karakter khas Islam merupakan unit utama yang menunjukkan sebuah entitas *ummat* tersendiri atau bangsa tersendiri yang berasal dari latar kesejarahan, bahasa, budaya dan negara atau *state* yang berbeda-beda. Agama tetap menjadi faktor utama identitas politik, patron dan juga sumber otoritas dalam segala hal.

Dengan asumsi demikian, maka konsep *nation-state* dengan semua variabel modernnya pada dasarnya asing, a-historis dan tidak dikenal dalam ajaran Islam.¹³ Islam semenjak kemunculannya, dengan Piagam Madinah sebagai dokumen politik, hanya mengenal istilah *ummah* yang *coextensive* dengan universalitas Islam sendiri yang dalam wilayah negara menjadi identitas religio-politik yang lintas geografis, etnis, lintas budaya dan peradaban. Sedangkan konsep *nation-state* dengan variabel modernnya seperti nasionalisme dikenal di Dunia Islam belakangan, yakni sejak terjadinya kontak Dunia Islam dengan Dunia Barat modern yang terjalin lewat kolonialisme.

Pada abad XIX, kolonialisme Barat di Asia Timur dan Timur Tengah menegaskan gagasan *nation-state* sehingga nasionalisme dikenal lebih mendalam oleh para tokoh-tokoh Islam. Maka, sejak itu pula gagasan-gagasan tersebut tidak hanya sebagai pengetahuan lepas, tetapi menjadi perdebatan sengit yang terkadang dicarikan legitimasinya dalam Islam.¹⁴ Kemudian pada permulaan abad XX, fenomena nasionalisme menjadi lebih dikenal oleh khalayak Islam secara keseluruhan. Bahkan, ia menjadi sebuah komitmen perjuangan dan pergerakan oleh sebagian organisasi sosial-politik yang ditandai dengan munculnya para pejuang nasionalisme di Dunia Islam. Para pejuang nasionalisme tidak hanya mempropagandakan gagasan nasionalisme untuk jargon antikolonialisme tetapi juga untuk media mobilisasi kekuatan politik Islam dalam bentuk nasionalisme agama yang berorientasi kepada nasionalisme yang berbasis Islam.

¹²Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11-16.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik*, hlm. 11-16.

Penerimaan konsep *nation-state* oleh Dunia Islam setidaknya dikarenakan tiga hal; *pertama*, teori politik Islam klasik dan pertengahan tidak memberikan konsep yang jelas dan detail tentang penyelenggaraan negara secara modern yang lebih mengedepankan pluralisme politik sehingga memberikan reinterpretasi yang varian bagi para pihak baik yang menerima atau yang menolak konsep *nation-state*. Konsep *nation-state* merupakan sebuah pilihan yang tak terhindarkan dan sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam politik modern. *Kedua*, praktek Dunia Islam pascakolonialisme yang kemudian memproklamkan diri sebagai negara yang berdaulat dengan mengakui pluralisme politik dalam wilayah teritorial tertentu menjadi sebuah konsensus dan kesadaran bersama dalam penerimaannya terhadap konsep *nation-state*. *Ketiga*, banyaknya para “ulama” dan pemimpin-pemimpin Islam yang mendukung penerapan *nation-state* secara menyeluruh atau sebagian sebagai sesuatu yang alami dalam institusi politik yang bersifat duniawi.¹⁵

Di Indonesia, perdebatan selama abad 20 adalah menyangkut persoalan peran Islam dalam konteks gagasan dan praktek berbangsa. Dimulai dengan perbincangan di seputar *nation state* yang kemudian dapat melahirkan bentuk nasionalisme modern Indonesia. Hampir semua negeri Muslim di dunia Ketiga termasuk Indonesia, mengalami problem *nation-state* dalam mencari identitas dan karakter kebangsaannya (*nation character buildings*). Khususnya di Indonesia, problem *nation-state* semacam ini terkadang belum terselesaikan tuntas yang pada gilirannya akan selalu melahirkan penghadapan “Islam vs. Negara” dengan sebutan yang dikotomis; negara agama (*diniyyah*) dan negara sekuler (*la diniyyah*). Pertentangan dan dikotomi seperti ini akan menjadi ganjalan dalam penyelenggaraan negara dalam konteks *nation-state*. Penghadapan Islam vs. negara ini praktis dimulai sejak masa pergerakan nasional, menjelang kemerdekaan, kemudian berlanjut pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masih terasa hingga sekarang.

¹⁵ Lihat: James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation States* (New York: Cambridge, 1994), hlm. 45.

Islam dan Nasionalisme masa Pergerakan Nasional Indonesia: Studi terhadap Peran Politik Sarekat Islam (SI)

Fenomena munculnya ide nasionalisme merupakan sebuah gerakan politik yang terjadi pada sebuah negara di belahan dunia, khususnya bagi negara yang terjajah oleh imperialis asing. Seperti munculnya nasionalisme Arab,¹⁶ nasionalisme India,¹⁷ nasionalisme Turki¹⁸ dan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme yang terjadi tersebut bisa menjadikan alat pemersatu sekaligus sebagai pembebas kaum tertindas.

Nasionalisme Indonesia dimulai ketika perlunya kesadaran nasional untuk keluar dari belenggu penjajah Belanda. Karena perjuangan yang bersifat kecaerahan dirasa tidak efektif mengusir penjajah Belanda di Indonesia, seperti perang Diponegoro (1825-1830), perang Paderi (1821-1832), Aceh (1875-1903). Oleh karena itu, perlu disusun suatu kekuatan yang mengikat potensi yang ada di seluruh tanah air seperti pada zaman Majapahit. Kesadaran seperti ini dikenal sebagai kesadaran nasional, yaitu kesadaran yang menggalang semangat kebangsaan yang meliputi kepentingan nasional.¹⁹

Awal abad 20 merupakan momentum kebangkitan nasionalisme Indonesia. Berbagai gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan, berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bangsa. Tidak diragukan lagi, dalam upaya-upaya nasionalistik ini, Islam memainkan peran yang

¹⁶ Nasionalisme Arab merupakan tuntutan bangsa Arab untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris dan Perancis yang telah memecah negara-negara Arab dengan batas-batas wilayah dan mewariskan dilema bagi masa depan bangsa Arab, yaitu wilayah yang terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah kecil. Lihat: Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 147-148.

¹⁷ Nasionalisme India pada awalnya bersifat *Brahman*, dicetuskan oleh kaum Brahmana (kasta tertinggi di India) dengan semboyan "India-Arya, India dalam Keemasan - kembali ka Weda" Namun ide nasionalisme yang ditiupkan kelompok Brahmana tersebut kurang mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat India, termasuk di dalamnya kasta Sudra dan Paria. Umat Islam India juga merasa khawatir apabila nasionalisme India ini akan menjadi nasionalisme Hindu yang akan mengancam keberadaan umat Islam India yang minoritas. Lihat Lothrof Stoddard, *The New World*, hlm. 207-208.

¹⁸ Nasionalisme Turki adalah suatu paham kebangsaan yang berpendapat bahwa semua orang Turki, baik yang berada di Kerajaan Turki Usmani maupun di Rusia merupakan suatu bangsa dan harus bersatu atas dasar kepentingan mereka yaitu agama dan bangsa. Lihat Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 42.

¹⁹ M. Abdul Karim, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia (Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI)* (Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005), hlm. 18-19.

amat menentukan. Seperti dicatat oleh para pengkaji nasionalisme Indonesia, Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional menentang kolonialisme Belanda. “Agama Muhammad”, tulis George Mc Kahin dalam karyanya yang klasik, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan; melainkan ia merupakan simbol kesamaan nasib (*ingroup*) menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain.²⁰

Satu-satunya representasi perwujudan politik umat Islam pada awal pergerakan nasional Indonesia adalah Sarekat Islam (SI), SI adalah salah satu di antara organisasi politik Indonesia abad ke-20 yang paling menonjol, seperti ditulis oleh P.H. Fromberg bahwa, alasan Oemar Said Tjokroaminoto yang menjadikan agama sebagai idiologinya, “Sarekat Islam menggunakan agama Islam sebagai tali pengikat, dan apa yang dicitakannya adalah kemajuan bangsa Indonesia, dan Islam tidaklah menjadi penghambat karenanya”. Pikiran Oemar Said Tjokroaminoto seperti ini merupakan refleksi keinginan rakyat saat itu, sehingga Islam dipilih sebagai formula politiknya, sebagai pengikat kesatuan bangsa.²¹

Sejarah Sosial-Politik Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam (SI) adalah transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan pada 11 November 1911,²² oleh H. Samanhudi, seorang saudagar muslim kaya keturunan Bugis Makasar di Surakarta Jawa Tengah. Pada awalnya, Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk melawan dominasi Cina keturunan yang menguasai dunia perdagangan dengan mengorbankan pribumi.

²⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 62-63.

²¹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 193.

²² Ada juga yang berpendapat bahwa Sarekat Islam (SI) sebenarnya sudah berdiri sejak 16 Oktober 1905 dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI). Dan menurut mereka, tanggal berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) ini lebih tepat disebut sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”, dan bukan tahun 1908 dengan patokan berdirinya Budi Utomo. Karena ruang lingkup Budi Utomo hanya terbatas pulau Jawa, bahkan hanya etnis Jawa Priyayi pada tahun 1908 itu. Sedangkan Sarekat Dagang Islam mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi, inilah yang layak disebut “Nasional”. Agung Pribadi, “Islam Meretas Kebangkitan” dalam majalah Sabili edisi khusus, *Sejarah Emas Muslim Indonesia* (2003), hlm. 74.

Dalam Anggaran Dasar Sarekat Dagang Islam (SDI) dikatakan bahwa, “meningkatkan persaudaraan di antara anggota, tolong-menolong di kalangan kaum muslimin; berusaha maningkatkan derajat kamakmuran dan kebebasan negeri” adalah sebuah keharusan. Organisasi ini disambut positif oleh seluruh masyarakat, hingga meluas sampai lapisan masyarakat bawah di pulau Jawa. Besarnya dukungan rakyat kepada SDI membuat khawatir pemerintah Belanda kala itu. Dan SDI dianggap sebagai organisasi yang dapat menggoyang stabilitas pemerintahan. Untuk itu pada awal Agustus 1912, Residen Surakarta segera membekukan SDI. Namun dalam perkembangannya, karena dianggap tidak ada bukti yang memadai, pada tanggal 26 Agustus 1912 pembekuan dicabut, dengan syarat harus dilakukan perubahan pada anggaran dasarnya.²³

Untuk menyikapi perubahan di tanah air, maka SDI (sebagai aset ummat) segera melakukan perubahan pada tubuh organisasi. Dan muncullah sosok pemimpin baru yang brilyan, yakni Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto (1883-1934).²⁴ Kemudian disusunlah anggaran dasar baru bahwa organisasi ini dinyatakan meliputi seluruh Indonesia,²⁵ dan sekaligus menghapus kata “Dagang” pada nama organisasi tersebut (SDI menjadi SI). Anggaran Dasar Sarekat Islam (SI) disahkan dengan akta notaris di Surabaya, bertanggal 10 September 1912.²⁶

Perubahan Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI) bukan hanya dalam perubahan nama, tapi lebih pada perubahan orientasi, yaitu dari komersial ke politik. Tjokroaminoto, adalah tokoh muslim pertama pada masa modern, yang menyatakan Islam sebagai “faktor

²³ Yeni Rosdianti Rasio, “SDI, SI Sang Pelopor Kebangkitan” dalam majalah Sabili edisi khusus, *Islam Lawan atan Kawan* (2004), hlm. 14.

²⁴ Oemar Said Tjokroaminoto berasal dari keluarga priyayi, ayahnya bernama Raden Mas Tjokroamiseno, wedana Kleco Mediu, dan kakeknya Raden Mas Tjokronegoro Bupati Ponorogo. Tetapi, pada dirinya lebih banyak dialiri darah buyutnya, Kiai Bagus Kasan Basari, yang selama hidupnya sangat dekat dengan rakyat dan memperjuangkan tegaknya ajaran Islam di Tegalsari, Ponorogo, Madiun, Jawa Timur. Ahmad Mansur Suryanegara, *Menuju Sejarah*, hlm. 191.

²⁵ Dalam kongres pertamanya di Surabaya 13 Januari 1913, Sarekat Islam membagi wilayah organisasi menjadi tiga bagian, yaitu Jawa Barat (meliputi Jawa Barat, Sumatra dan pulau-pulau disekitarnya), Jawa Tengah (meliputi Kalimantan), Jawa Timur (meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau lain di Indonesia Timur). Ketiga wilayah ini serta cabang-cabang Sarekat Islam (SI) berada di bawah pengawasan dari pengurus pusat di Surakarta yang diketuai oleh H. Samanhudi. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 118-119.

²⁶ Yeni Rosdianti Rasio, “SDI, SI Sang Pelopor, *Ibid.*

pengikat/pemersatu dan menjadikan Islam sebagai simbol nasional” menuju kemerdekaan yang sempurna bagi rakyat Indonesia.²⁷ Sekalipun memiliki latar belakang pendidikan Barat, namun Tjokroaminoto tidak suka bekerja pada pemerintah, dan berusaha membina karirnya di tempat lain, Ini terjadi setelah ia bekerja pada pemerintah selama beberapa tahun untuk kemudian mengundurkan diri.²⁸

Pada periode setelah 1916, wawasan Sarekat Islam (SI) adalah wawasan nasional untuk terbentuknya suatu bangsa. Sejak tahun ini pula, kongres Sarekat Islam (SI) disebut sebagai Kongres Nasional.²⁹ Pada Kongres Nasional dirumuskan sikap politik Sarekat Islam (SI) yang disahkan pada Kongres II di tahun berikutnya, 1917. Isi pokok organisasi antara lain mengharapkan hancurnya kapitalisme, melakukan upaya perlawanan terhadap praktik-praktik penindasan oleh penguasa, dan memperjuangkan agar rakyat nantinya akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri.³⁰

Perjuangan H.O.S Cokroaminoto dengan Sarekat Islamnya pada masa kolonialisme mendapat dukungan dari semua kalangan masyarakat, dan banyak organisasi yang berdiri disaat Sarekat Islam masih berjaya berusaha memakai konsep pemikiran maupun simbol Sarekat Islam yang nasionalis, seperti partai nasional Indonesia (PNI) yang di pelopori oleh Soekarno, Partindo (Partai Kristen Indonesia), Kedua parpol tersebut menganggap Sarekat Islam sebagai pelopor pergerakan nasional dalam rangka menuntut kemerdekaan Indonesia dari konolianisme barat.

Dari waktu ke waktu Sarekat Islam (SI) mengalami perkembangan yang kian pesat. Dan pada waktu itu SI menjadi kekuatan politik yang amat terasa pengaruhnya di tanah air. Pada tahun 1916, tercatat 181 cabang Sarekat Islam (SI) di seluruh Indonesia dengan tidak kurang dan 700.000 orang

²⁷ Lihat: Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 79-80.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dalam Kongres Nasional ini, menurut Muhammad Roem melalui Bunga Rampai dari Sejarah dihadiri sebanyak 80 utusan dari berbagai daerah: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*. hlm. 195.

³⁰ Pada pawai Kongres Nasional Sarekat Islam di Bandung tahun 1916 perriah terbesar niat untuk mengibarkan bendera Turki sebagai simbol (khilafah) pemersatu umat Islam seluruh dunia. Meskipun tidak banyak perannya dalam kehidupan politik umat Islam Indonesia, namun khilafah masih menjadi kebutuhan bagi umat Islam Indonesia saat itu. M. Roem, *Bunga Rampai Sejarah*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 16.

tercatat sebagai anggotanya. Dan menurut W.F. Wertheim, dalam *“East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia”* mencatat, pada tahun 1919, anggota Sarekat Islam (SI) mencapai lebih dari dua (2) juta jiwa.³¹ Sebuah angka yang fantastis kala itu. Budi Utomo di masa keemasannya saja - pada 1909 -- hanya beranggotakan tak lebih dari 10.000 orang. Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 ini masih bercorak lokal. Selain itu, gerakan yang diawali oleh perjalanan dokter Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priyayi Jawa ini iebih bersifat elitis. Sebagian besar anggotanya adalah kaum terpelajar, pegawai negeri dan para bangsawan. Tujuan Budi Utomo juga masih terbatas pada kemaslahatan sektoral Jawa dan Madura - serta tidak disebut-sebut kemerdekaan dalam platform organisasinya.

Sarekat Islam (SI) mempunyai tujuan jangka panjang yang luhur, yaitu mengobarkan semangat keislaman bagi masyarakat Indonesia. Untuk meraih tujuan tersebut, maka kemerdekaan tanah air merupakan sesuatu yang mutlak. Tjokroaminoto sering menegaskan masalah ini, dan pada tahun 1931 ia menulis: “...tak boleh tidak kita kaum muslimin mesti mempunyai kemerdekaan ummat atau kemerdekaan kebangsaan (*nationale vrijheid*) dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri.” Bukan hanya itu saja, Tjokroaminoto juga berkeinginan untuk mencontoh negara Islam merdeka yang pernah di bangun Rasulullah di Madinah.³²

Wacana Islam dan Nasionalisme dalam Sarekat Islam (SI): Sebuah Konflik Ideologis

Dengan semakin berkembangnya Sarekat Islam (SI) hal ini membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, Hindia Belanda berusaha mencari cara untuk dapat mengaburkan pengaruh Sarekat Islam (SI) di masyarakat. Para penguasa tidak mau bertindak frontal untuk memukul Sarekat Islam (SI) karena akan dapat menimbulkan reaksi di kalangan rakyat Indonesia. P.H. Fromberg, mantan anggota Mahkamah Agung Hindia Belanda, pada tahun 1914, menyadari bahwa kekuatan Sarekat Islam (SI) bukan pada kelompok-kelompok yang terpecah-pecah tapi dalam wujud massa bersatu. Bung Hatta pada tahun 1930 pernah menulis bahwa Sarekat Islam (SI) diibaratkan “sebuah hostel umum di mana segala macam orang dapat

³¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang*, hlm. 81.

³² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang*, hlm. 80.

berkumpul bersama untuk mengemukakan segala keluhan-keluhan mereka dan memberberkan isi hati mereka kepada teman dan saudara-saudara mereka.³³

A.W.F. Idenburg, Gubernur Jenderal pada tahun 1911-an, menyadari ancaman yang dibawa Sarekat Islam (SI) terhadap kekuasaan kolonial. Dengan alasan inilah pada bulan Maret 1914, ia membuat undang-undang yang isinya adalah ia hanya memberikan pengakuan kepada berbagai cabang Sarekat Islam (SI), tidak kepada Sarekat Islam (SI) sebagai satu kesatuan organisasi. Tindakan ini bertujuan untuk memecah Sarekat Islam (SI) ke dalam perserikatan-perserikatan kecil, dan “masing-masingnya akan berdiri bebas dan tidak ada hubungannya antara satu dan lainnya,” Dengan tindakan ini Idenburg berharap bahwa pimpinan Sarekat Islam (SI) pusat tidak lagi mempunyai otoritas penuh terhadap cabang-cabangnya.³⁴

Tindakan untuk memecah belah Sarekat Islam (SI) yang dilakukan Idenburg tidak cukup sampai disitu saja. Ia juga berupaya menghancurkan kekuatan Sarekat Islam (SI) dari dalam, yaitu dengan cara memberi peluang kepada ideologi baru yang berhaluan radikal (Marxisme³⁵) untuk melakukan infiltrasi terhadap Sarekat Islam (SI) melalui cabang-cabang Sarekat Islam (SI) di daerah.³⁶

Pada 1917, paham ideologis Marxis mulai menyusup ke dalam Sarekat Islam (SI). Samaun dan Darsono dari Sarekat Islam (SI) cabang Semarang menjadi artikulator-artikulatornya yang paling menonjol. Dan pada tahun 1920, ISDV ditransformasikan menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), sebagai partai politik yang sepenuhnya beraliran komunis. Namun demikian kedua tokoh ini tetap mempertahankan keanggotaan mereka dalam Sarekat Islam (SI) - berdiri di barisan terdepan kepemimpinan partai ini.³⁷

Diperkenalkannya Marxisme ke dalam Sarekat Islam (SI) memancing timbulnya konflik dan perpecahan dikalangan para pemimpin organisasi ini.

³³ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 82-83.

³⁵ Marxisme pertamakali diperkenalkan oleh tokoh-tokoh Marxis Belanda, yang diketuai oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, Seorang Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Pada tahun 1914 kelompok Marxis mendirikan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*, Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda), dan lewat organisasi inilah kemudian gagasan-gagasan dan slogan-slogan Marxis "diekspor" ke dalam tubuh Sarekat Islam melalui seorang Semaun. *Ibid.*, hlm. 86. Lihat juga: Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, hlm. 53.

³⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang*, hlm. 83.

³⁷ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, hlm. 54.

Hal ini terutama benar dalam kaitannya dengan upaya masing-masing faksi (yakni faksi Islam dan faksi Marxis) dalam organisasi itu untuk memperoleh kontrol dan pengaruh dalam mendefinisikan agenda-agenda sosialistik dan revolusioner Sarekat Islam (SI). Untuk menjamin tetap terpeliharanya persatuan dalam organisasi, maka pengurus pusat Sarekat Islam (SI) terdorong untuk menekankan watak sosialistik dan revolusioner organisasi ini.

Sebenarnya, yang menjadikan jurang perbedaan antara kedua belah pihak adalah perbedaan landasan teologis-ideologis masing-masing faksi. Tiga serangkai Tjokroaminoto, Agus Salim dan Abdoel Moeis dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah ideologi partai itu, dan mereka menggerakkan, partai itu sejalan dengan gerakan Pan-Islamisme di Timur Tengah. Sebaliknya, Samaun dan Darsono “lebih menghendaki disingkirkannya agama dari politik praktis”, seraya mengorientasikan diri mereka serta seluruh kegiatan partai kepada prinsip-prinsip Marxis.³⁸

Perbedaan mendasar antara golongan Islam dan Marxis ini, akhirnya mengarah pada perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam (SI). Pada kongres keenam Sarekat Islam di Surabaya pada 1921, penganut Marxis dikeluarkan dari organisasi dengan alasan mereka melanggar disiplin partai, yaitu mempertahankan keanggotaan mereka dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).³⁹

Perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam (SI) banyak membuat sejumlah kalangan kecewa. Di antaranya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Kekecewaan itu ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok pelajar yang bermula di Surabaya, Bandung, setelah itu di kota-kota di seluruh Jawa dan di luar Jawa.⁴⁰ Di bawah pengaruh seorang anggota PI⁴¹ yang telah kembali ke tanah air, Ishak Tjokrodisurjo, mendirikan sebuah kelompok studi di Bandung, di mana usaha praktisnya dilakukan oleh Anwar dan Soekarno. Pengaruh PI dan anggota-anggotanya yang telah kembali ke Indonesia mengakibatkan berdirinya Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927. Pada mulanya partai ini dimaksudkan sebagai duplikat dan PI di Indonesia atas inisiatif Hatta. Oleh karena itu ideologi yang dikembangkan PNI yang

³⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hlm. 66-67.

³⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hlm. 67-68.

⁴⁰ Di daerah juga muncul gerakan pemuda (pelajar) yang bersifat kedaerahan seperti, Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Celebes dan lain-lain. Tamar Djaja, *Soekarno-Hatta Persamaan dan Perbedaannya* (Sastra Hudaya, tt.), hlm. 38.

⁴¹ PI singkatan dari *Partij Indische*. Sebuah organisasi politik yang mengatakan dirinya sebagai kelompok nasionalis Indonesia di negeri Belanda.

didirikan oleh Soekarno itu tidak berbeda dengan ideologi yang sudah dikembangkan oleh PI di negeri Belanda.⁴²

Kekecewaan PI dan PNI terhadap perpecahan di tubuh Sarekat Islam (SI) terutama disebabkan terjadinya perpecahan dikalangan kelompok nasionalis. Padahal kedua kelompok tersebut selalu berusaha menggagas persatuan dikalangan kelompok nasionalis untuk bersama menumbangkan kekuatan kolonial Belanda. Tetapi usaha untuk mempersatukan kelompok nasionalis selalu gagal, dan pada akhirnya menambah satu kutub baru, yang disebut kelompok nasionalis.

Perpecahan antara tiga golongan tersebut, menurut Deliar Noer disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima bersifat Barat yang sekuler, terutama sekolah-sekolah yang didirikan Belanda pada umumnya, malahan juga didirikan oleh misionaris Kristen. Sarana pendidikan tersebut memang diusahakan oleh Belanda agar menimbulkan emansipasi dari pengaruh agama di kalangan pelajar. Sebab agamalah terutama yang menimbulkan pergolakan politik di kalangan rakyat Indonesia.⁴³

Golongan sekuler tersebut kemudian pecah menjadi dua: PKI (Komunis) di satu pihak, PI dan PNI (Nasionalis) di pihak lain. Oleh karena itu masa pencarian ideologi ini memang ditandai oleh adanya tiga aliran besar di Indonesia, yaitu Islam, Komunis dan Nasionalis. Tapi dalam konflik dan dialog ideologi pada fase ini, PKI yang membawa ideologi Komunisme hanya terlibat dalam waktu yang sangat singkat, karena PKI dianggap sebagai partai terlarang.⁴⁴

Dengan hilangnya PKI dalam kancah perpolitikan di Indonesia, maka konflik dan dialog ideologi selanjutnya hanya melibatkan dua kelompok, yaitu Islam dan nasionalis. Di samping itu juga terjadi perpecahan di kalangan intern nasionalis, sebagaimana terjadi perpecahan antara kelompok yang dipimpin Soekarno dengan kelompok yang di pimpin Hatta sekembalinya Hatta ke Indonesia.

⁴² Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 28.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

Munculnya Islam Politik pada Masa Pergerakan Nasional

Dengan merosotnya peranan SI, kepemimpinan perjuangan nasionalisme beralih ke tangan kaum nasionalis nonreligius. Yang terkemuka diantara mereka berasal dari PNI (Partai Nasional Indonesia). Dibentuk pada tahun 1927 di bawah pimpinan insinyur berpendidikan Belanda, Ahmad Soekarno, PNI merupakan organisasi yang berbasis kebangsaan multietnik, dan bukan nasionalisme agama atau etnik. Nasionalisme sekuler Soekarno bermula dari ketertarikannya pada gagasan *Pencerahan Eropa* dan gagasan-gagasan liberalisme-sosialis. Menurut Soekarno pemisahan Islam dari Negara akan membebaskan Islam dari perilaku para penguasa yang korup dan bisa menunjukkan kekuatan progresifnya.⁴⁵

Namun dimata kebanyakan politisi muslim masa itu, gagasan nasionalisme Soekarno dianggap terlalu lemah untuk membangun sistem politik yang baru. Bagi mereka nasionalisme model Soekarno terlalu kebarat-baratan. Para penulis muslim berpendapat, nasionalisme sekuler tak ubahnya sebagai versi modern dari *'asabiyah* (solidaritas kesukuan) yang memecah belah umat Islam pada masa pra-Islam dan menentang segala yang diperjuangkan Nabi Muhammad.⁴⁶ Sementara, Islam bagi mereka menawarkan satu basis yang lebih berarti bagi persaudaraan di dibandingkan dengan bentuk-bentuk etnisitas dan sosialisme yang berasal dari Barat.⁴⁷

Pandangan Islam merupakan sebuah sistem sosial (*al-Nizham al-Islami*) yang abadi dan komplit (*kaffah*) ini menjadi tema yang kembali bergaung dalam politik Islam modern pada masa pergerakan nasional bahkan sampai sekarang gaung kebangkitan islam politik ini mewarnai proses demokratisasi di Indonesia. Menjadikan Islam sebagai basis ideologi politik dikalangan umat Islam telah menjadikan islam terjerumus dalam kepentingan politik praktis bahkan terjadi pertentangan diantara umat Islam itu sendiri. Bukti nyata, pada masa orde baru pemberontakan yang dilakukan DII/NII Kartosuwiryo, masa sekarang merosotnya semangat nasionalisme dengan pemberlakuan Perda Syari'at Islam di beberapa daerah serta munculnya gerakan fundamentalisme Islam mulai dari

⁴⁵ Robert W. Hefner, *Civil Islam*, hlm. 79.

⁴⁶ Mengenai pengertian *'asabiyah*' dalam wacana politik Islam, lihat, "Asabiyah", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. I (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 140.

⁴⁷ Mengenai argumen-argumen umat Islam yang tidak setuju dengan bentuk nasionalisme sekuler pada era pascakolonial, lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, hlm. 259-266.

MMI, FPI, Hizbut Tahrir dan organisasi-organisasi fundamentalisme Islam yang lain.

Kesimpulan

Islam dan nasionalisme adalah sebuah konsep untuk mempertahankan konsep politik Islam dengan gagasan kebangsaan dan kewarganagaraan, contoh peran gerakan politik Sarekat Islam (SI). SI adalah sebuah organisasi Islam yang menghembuskan semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia. SI didirikan Pada tahun 1911, yang merupakan organisasi sosial-politik umat Islam modern yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Islam. Mengenai hal ini Deliar Noer menyatakan, nasionalisme Indonesia sebenarnya dimulai dengan nasionalisme Islam.

Pergumulan Islam dan Nasionalisme tidak lebih pada masalah hubungan agama dan negara, dan sebenarnya permasalahan ini merupakan masalah Dunia Islam secara umum sebagai wujud ketidaksiapannya memasuki wilayah *nation-state* secara utuh. Karena penyelenggaraan negara dalam wilayah *nation-state* menuntut adanya penegasan karakter dan identitas kebangsaan (*nation character buildings*), maka tarik-menarik dalam hubungan agama dan negara dalam satu wilayah *nation-state* akan semakin mengkaburkan definisi dan identitas *nation character buildings* yang pernah atau akan dibangunnya. Dalam permasalahan ini negara Indonesia dibangun dan berdiri tanpa disertai *nation character buildings* yang jelas. Sehingga wajar jika sejak awal kemerdekaannya hingga saat ini telah terjadi tarik menarik kepentingan yang menuntut sebuah kepatuhan antara kepada agama dan kepada negara dengan berbagai variannya yang diekspresikan baik lewat jalan damai melalui parlemen seperti kasus Konstituante, maupun lewat jalan kekerasan: mongangkat senjata seperti DI/TII, atau sekedar ala preman jalanan model FPI.

Di zaman modern ini, seharusnya organisasi Islam yang ada dapat mengikuti jejak Sarekat Islam, dalam menegakkan nasionalisme berkebangsaan, dan masyarakat muslim sekarang harus bisa menjadi H.O.S. Cokroaminoto masa kini. Umat muslim harus bisa menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat yang sangat majemuk.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme; Reposisi wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Djaja, Tamar, *Soekarno-Hatta Persamaan dan Perbedaannya*, Sastra Hudaya, t.t
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. I, New York: Oxford University Press, 1996.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS 2001.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>.
- Karim, M. Abdul, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia (Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI)*, Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Majalah Sabili edisi khusus, *Sejarah Emas Muslim Indonesia* (2003).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Rasio, Yeni Rosdianti, "SDI, SI Sang Pelopor Kebangkitan" dalam majalah Sabili edisi khusus, *Islam Lawan atau Kawan* (2004).
- Roem, M., *Bunga Rampai Sejarah*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Rustow, Dankwart A., entri "Nation" dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. 11, New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972.
- Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation States*, New York: Cambridge, 1994.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Stoddard, Lothrop, *The New World of Islam*, London: Chapman and Hall Ltd, 1922.

Syaukani, Ahmad, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos, 1999.